

**SELAMAT DATANG DI BPHN  
ANDA MEMASUKI  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**



**MUATAN TEKNIS SUBSTANTIF LEMBAGA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

# STRUKTUR ORGANISASI BPHN

**BPHN HEBAT**  
Harmoni - Efektif & Efisien - Berprestasi - Akuntabel - Terpercaya



## Rincian struktur eselon :

Eselon I : 1  
Eselon II : 5  
Eselon III : 17  
Eselon IV : 44

**Jumlah Pegawai**  
**239**

## Rincian Jumlah JFT :

Pustakawan : 17  
Dokter : 2  
Perawat : 2  
Perancang : 7  
Penyuluh : 40  
Pranata Komputer : 4  
Analisis Kepegawaian : 1

## TUGAS

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## FUNGSI

- penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional
- pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum
- Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri



# VISI DAN MISI KEMENKUMHAM

Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Publik



Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Melindungi Kepentingan Nasional



**Tugas dan Fungsi BPHN terkait dengan Misi nomor 1 dan 2**



**Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum**



Mewujudkan Penegakan Hukum yang Menjadi Pendorong Inovasi, Kreativitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM yang Berkelanjutan

# OUTPUT BPHN

**BPHN HEBAT**

Harmoni - Efektif & Efisien - Berprestasi - Akuntabel - Terpercaya



Sekretariat

Dukungan  
Manajemen &  
Pelaksanaan  
Tugas Teknis  
Lainnya



Pusat Analisis dan  
Evaluasi Hukum  
Nasional

Rekomendasi  
Analisis &  
Evaluasi Hukum

Dokumen  
Pembangunan  
Hukum Nasional



Pusat Perencanaan  
Hukum Nasional

Prolegnas,  
Progsun PP &  
Progsun Perpres

Fasilitasi  
Prolegda

Naskah  
Akademik

Penyelarasan  
Naskah  
Akademik



Pusat Dokumentasi  
dan Jaringan  
Informasi Hukum  
Nasional

Anggota  
jaringan yang  
terintegrasi

Data Hukum  
Nasional



Pusat Penyuluhan  
dan Bantuan Hukum

Desa Sadar  
Hukum

Penyuluh &  
Penyuluhan  
Hukum

Bantuan Hukum

Media  
Pemberdayaan  
Masyarakat

Dengan output tersebut  
BPHN mempunyai peranan  
yang penting :

Mendukung  
Deregulasi

- Pelaksana Fungsi Menteri selaku koordinator Prolegnas di lingkungan Pemerintah
- Instansi Yang berwenang melakukan penyelarasan NA dari seluruh K/L

Koordinator  
JDIH

- Panitia Pusat Bantuan Hukum
- Pembina JFT Penyuluh Hukum



**TERIMA KASIH**